

## **Meminimalisir Tingkat Kemiskinan Gunung Kidul Melalui Pemberdayaan Wisata Bahari**

Di Indonesia kemiskinan telah diyakini sebagai permasalahan yang kompleks, sehingga dalam mengatasi kasus kemiskinan dibutuhkan penyelesaian yang komprehensif yang tentunya melibatkan banyak pihak. Hal ini didorong oleh sebuah kesepakatan Internasional Millenium Development Goals (MDGs) yang memotivasi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk menyusul ketertinggalan. (Janianto, 2015)

Fenomena ini pada dasarnya sudah dipahami oleh pihak pemerintah, karena komposisi penduduk miskin masih mengikuti trend yang sama. Dalam mengatasi kasus kemiskinn sebenarnya berbagai program telah diluncurkan oleh pemerintah yang langung diaplikasikan dalam wujud kebijakan-kebijakan atau program, baik yang bersifat langsung atau tidak langsung.

Kebijakan secara langsung adalah kebijakan yang langsung diberikan kepada penduduk miskin, seperti; Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Miskin (Raskin). Sedangkan kebijakan tidak langsung, seperti; program Jamkesmas, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan lain sebagainya.

Jumlah masyarakat miskin di Indonesia masih didominasi di wilayah pedesaan. Oleh karena itu dalam mengatasi hal ini, hendaknya pemerintah menargetkan pengang- gulangan kemiskinan di pedesaan, melalui pengembangan destinasi wisata bahari yang menarik bagi wisatawan. Dengan harapan dapat memberikan peluang lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Pada era kepemimpinan Joko Widodo telah ditetapkan Nawa Cita Sebagai program prioritas pembangunan kabinet kerja 2015-2019. Pada kabinet kerja ini sektor pariwisata menjadi sektor unggulan dengan pertumbuhan yang begitu cepat sehingga menjadi lokomotif penerimaan devisa negara, pengembangan usaha, pembangunan infrastruktur serta menyerap tenaga kerja. (Teguh, 2017)

Beberapa waktu lalu pemerintah menetapkan sektor pariwisata sebagai *core business* ekonomi nasional. Upaya dalam pengembangan pariwisata mencakup: destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan termasuk pemberdayaan masyarakat.

Maka salah satu provinsi di Indonesia yang masih tergolong miskin dan relevan sebagai tempat pengembangan destinasi wisata berada di Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Gunung Kidul terkenal dengan wisata baharinya yang indah, bahkan menjadi salah satu tujuan wisata dunia.

Namun mirisnya Provinsi ini masih tergolong miskin jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, meskipun pada tahun 2018 angka kemiskinan turun 1,5% persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunung Kidul mencatat bahwa angka kemiskinan di Gunung Kidul menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Penduduk miskin pada tahun 2017 ada sekitar 135,737 ribu orang atau 18,65% dari penduduk gunung kidul. Sementara pada tahun 2018, penduduk miskin menurun 1,53% menjadi 17,12% atau 125,759% ribu orang. Angka ini masih tinggi dari rata-rata penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2018 berjumlah sekitar 12,13%.

Pemerintah Daerah DIY dan BPS Gunung Kidul menganalisis dari 18 kecamatan di Gunung Kidul ada 3 kecamatan yang tergolong miskin. Ketiga kecamatan tersebut yaitu Saptosari, Tanjungsari, dan Gedangsari. Dari ketiga wilayah tersebut Kecamatan Saptosari tercatat sebagai daerah dengan tingkat kesejahteraan rendah yakni dengan status kesejahteraan penduduknya hanya 67,47%, kemudian disusul oleh Kecamatan Tanjung sari dan Gedangsari. (BPS, Gunung Kidul 2018)

Menyadari hal ini sejumlah pemberdayaan dan pembangunan pun terus digalakkan oleh pemerintah pada tiga kecamatan ini, sehingga nantinya diharapkan mampu membawa perubahan terhadap masyarakatnya. Tingginya tingkat kemiskinan di Gunung Kidul tentunya tidak lepas dari tingkat pendidikan masyarakatnya.

Menurut pemberitaan yang termuat dalam [BeritaSatu.com](http://BeritaSatu.com) salah satu penyebab tingginya kemiskinan di Gunung Kidul adalah karena pendidikan yang rendah sehingga

produktivitas pun ikut rendah, walhasil angka kemiskinan tetap tinggi. Maka Inilah salah satu penyebabnya kenapa masyarakat tidak bisa mengembangkan daerahnya sendiri khususnya dalam pengembangan wisata bahari.

Padahal Gunung Kidul memiliki sekitar 102 pantai yang tersebar dari ujung timur yang berbatasan dengan Wonogiri dan ujung barat yang berbatasan dengan Bantul. Oleh karena itu dengan mengembangkan wisata bahari di Gunung Kidul setidaknya angka kemiskinan menurun dan lebih baik daripada sebelumnya.

Pemerintah setempat diharapkan dapat mengembangkan wisata bahari yang nantinya membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi serta dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka. Program pengembangan pariwisata dilakukan dengan sebaik mungkin, dengan harapan mendatangkan wisatawan baik dari domestik maupun mancanegara.

Pengembangan wisata bahari tidak pernah lepas dari peran pemerintah dan masyarakat setempat, karena yang tahu akan pengelolaan wisata bahari tentunya masyarakat itu sendiri. Maka antara masyarakat dan pemerintah saling berintegrasi melakukan sosialisasi, pemberdayaan, dan pengelolaan wisata yang dikelola berdasarkan manajemen yang telah ditetapkan secara bersama.

Begitupun para pemuda diharapkan menjadi pioner pengembangan wisata dengan pembangunan secara bertahap terhadap objek wisata pantai senggigi. Usulan pemuda kemudian menjadi realisasi bersama dengan elaborasi penataan wisata pantai dengan sebaik mungkin.

Menindak lanjuti hal tersebut, pemerintah dan masyarakat perlu melakukan suatu program yang disebut dengan *logical framework*. Input dari program ini adalah dana hibah dari pemerintah. Pelaksanaan program ini pun harus dilakukan melalui musyawarah pertemuan antara pemerintah dan warga untuk menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK), dan kemudian dilanjutkan dengan proses fasilitasi.

Output dari kegiatan ini adalah Rencana Usulan Kegiatan (RUK) tersebut lengkap dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kemudian dari output tersebut outcome yang ditargetkan adalah perencanaan yang melibatkan masyarakat dimana menghasilkan

infrastruktur dan konstruksi yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya akan memberikan impact berupa pengembangan infrastruktur dan konstruksi yang berguna baik bagi masyarakat maupun bagi wisatawan.

Dengan melakukan hal tersebut, maka diharapkan kemiskinan yang masih tinggi di Gunung Kidul dapat menurun dan lebih baik daripada sebelumnya, dan yang lebih *urgent* adalah dapat mensejahterakan masyarakatnya. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tergolong miskin dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2018). *Persentase Penduduk Miskin 2018*. Badan Pusat Statistik Gunung Kidul (BPS).
- Janianto Damanik, Dkk. (2015). *MEMBANGUN PARIWISATA DARI BAWAH*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Teguh, F. (2017). *MELANCONG KE LAUT: Tata Kelola Pariwisata Maritim Indonesia*. Yogyakarta: PUSHANKAM UPN "Veteran" Yogyakarta.